



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita alami, era ini merupakan kehidupan yang bercirikan perubahan yang cepat, kompleks, penuh resiko, dan penuh dengan kejutan. Dengan demikian individu, kelompok atau komunitas harus melakukan berbagai upaya untuk ikut berubah, menyesuaikan diri, atau mengambil kendali perubahan. Di sisi lain interdependensi antara komunitas, terkecil sekalipun, dan dunia sebagai totalitas, membuat semakin sulit bagi seorang individu untuk menghadapi perubahan sendirian. Apalagi melihat kenyataan, kenaikan harga BBM misalnya, yang merupakan perubahan di sektor ekonomi dan energi akan mempengaruhi sektor kehidupan yang lain.

Sejak tahun 1960, lahir sebuah konsep pemberdayaan komunitas yang disebut *Community Development* (selanjutnya disebut CD). CD adalah sebuah proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat (*United States Departement of Agriculture*, 2005).¹

Community Development tidak bertujuan untuk mencari dan menetapkan solusi, struktur penyelesaian masalah atau menghadirkan pelayanan bagi masyarakat. *Community Development* adalah bekerja bersama masyarakat

¹ Arnd, H. W. "*Pembangunan dan Pemerataan Indonesia Di Masa Orde Baru*". (Jakarta : LP3ES, 1987) Hal. 24

Pengembangan otonomi daerah yang diarahkan pada partisipasi aktif dari masyarakat sangat sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh CD. Kesesuaian antara kebijakan pemerintah dengan konsep pemberdayaan masyarakat seperti CD ini membutuhkan pendekatan yang tepat dalam mengimplementasikannya.

Di sisi lain, pendekatan *Strength Based* (Berbasis kekuatan) dengan sebuah produk metode *Appreciative Inquiry* terpusat pada potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk menjadikan hidup lebih baik. *Appreciative Inquiry* merupakan sebuah metode yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk perubahan yang

² Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Daerah*. (Jakarta : Menteri dalam negeri). Hal. 05

positif dengan memfokuskan pada pengalaman positif dan masa depan yang penuh dengan harapan.³

Dalam sepuluh tahun terakhir, *Appreciative Inquiry* menjadi sangat populer dan dipraktikkan di berbagai wilayah dunia, seperti untuk mengubah budaya sebuah organisasi, melakukan transformasi komunitas, menciptakan pembaharuan organisasi, mengarahkan proses merger dan akusisi dan menyelesaikan konflik. Dalam bidang sosial, *Appreciative Inquiry* digunakan untuk memberdayakan komunitas pinggiran, perubahan kota, membangun pemimpin religius, dan menciptakan perdamaian.⁴

Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas untuk menjaga hubungan timbal balik dan memberikan penguatan kepada setiap anggota masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang ada dan lebih bisa memecahkan masalah yang ada antar komunitas tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mayo bahwa masyarakat itu sendiri dapat diartikan dalam dua konsep yang meliputi:

1. Masyarakat sebagai sebuah tempat bersama, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
2. Masyarakat sebagai kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama

³ Haryono Suyono, Malik Ruslan. *Pemberdayaan Masyarakat : Pengantar Manusia Mandiri, Demokratis, dan Berbudaya*. (Jakarta : Khanata. 2006). Hal. 22

⁴ Haryono Suyono, Malik Ruslan. *Pemberdayaan Masyarakat : Pengantar Manusia Mandiri, Demokratis, dan Berbudaya*. (Jakarta : Khanata, 2006). Hal. 30

Modal usaha bagi kelompok usaha kecil merupakan permasalahan yang cukup pelik. Tidak hanya menghambat kelangsungan bisnis tetapi bisa mejadi penyebab gagalnya usaha yang tengah dirintis. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang salah satunya melalui Lembaga Koperasi untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat kecil memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya Kredit untuk Modal usaha bagi UMK dan koperasi yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ini merupakan alternatif bagi Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Kendala yang seringkali dihadapi oleh pengusaha Kecil, Mikro dan Koperasi adalah masalah permodalan di dalam mengembangkan usahanya.

Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kredit Usaha Rakyat Oleh Koperasi Ma'unah di Desa Gili Raja Sumenep?

¹⁰ Syafri Syairin. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.:2002) hal. 17

Yakni kolom debit dan kolom kredit. Jika kredit berarti kita menambahkan uang kita ke dalam tabungan, maka sebaliknya debit adalah pengurangan atau penarikan uang kita dari bank

Berdasarkan definisi kredit dan pengertian kredit yang telah dijelaskan diatas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa transaksi kredit dapat terjadi atau timbul karena ada suatu pihak yang meminjam uang atau barang kepada pihak yang lainnya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit adalah kegiatan jual beli dimana pembayarannya akan ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu baik sebagian ataupun seluruhnya. Aktivitas kredit diatas secara teknis akan mendatangkan piutang bagi kreditur dan mendatangkan utang bagi debitur. Demikian pembahasan mengenai definisi kredit atau pengertian kredit

Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan kredit usaha rakyat ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin.

Kredit Usaha Rakyat ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut

Pada dasarnya, Kredit Usaha Rakyat merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif

c. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Perlu digarisbawahi bahwa ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya sekedar komitmen politik untuk merubah kecenderungan dalam sistem ekonomi orde baru yang amat membela kaum pengusaha besar khususnya para konglomerat. Perubahan itu hendaknya dilaksanakan dengan benar-benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan. Tidak dapat disangkal bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya komitmen politik (*political will*), tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil, adalah sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar. Praktek membagi-bagi uang kepada

